



2024 RENCANA KERJA



**DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen satu tahunan bagi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program dan kegiatan yang progresif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penyusunan Renja disusun secara partisipatif dan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Penyusunan Renja ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. Kami mengakui masih banyak kekurangan dan perlunya penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu kerja keras dari semua pihak terutama dari unsur pimpinan dan staf yang ada di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah patut disyukuri.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh peran multi pihak dan sektoral sehingga Renja ini dapat selesai disusun. Renja ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.


Renja ini wajib dipedomani oleh seluruh pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja program kegiatan serta tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Renja Dinas tahun 2024.

Kedepan, hal yang harus segera kami lakukan adalah peningkatan kapasitas pegawai sehingga target capaian Renja Tahun 2024 yang ada pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



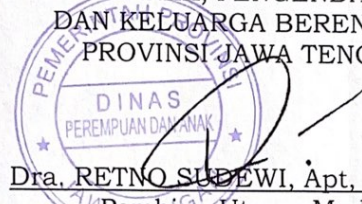
Dra. RETNO SUBEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19681124 199310 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024.

Semarang, September 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19681124 199310 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	41
3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
BAB V PENUTUP.....	70

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan	2
-----	---	---

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah.....	11
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	32
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah.....	36
3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024.....	42
3.2	Rencana Tindak Tahun 2024	44
4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah.....	50
4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah	59

BAB I

PENDAHULUAN

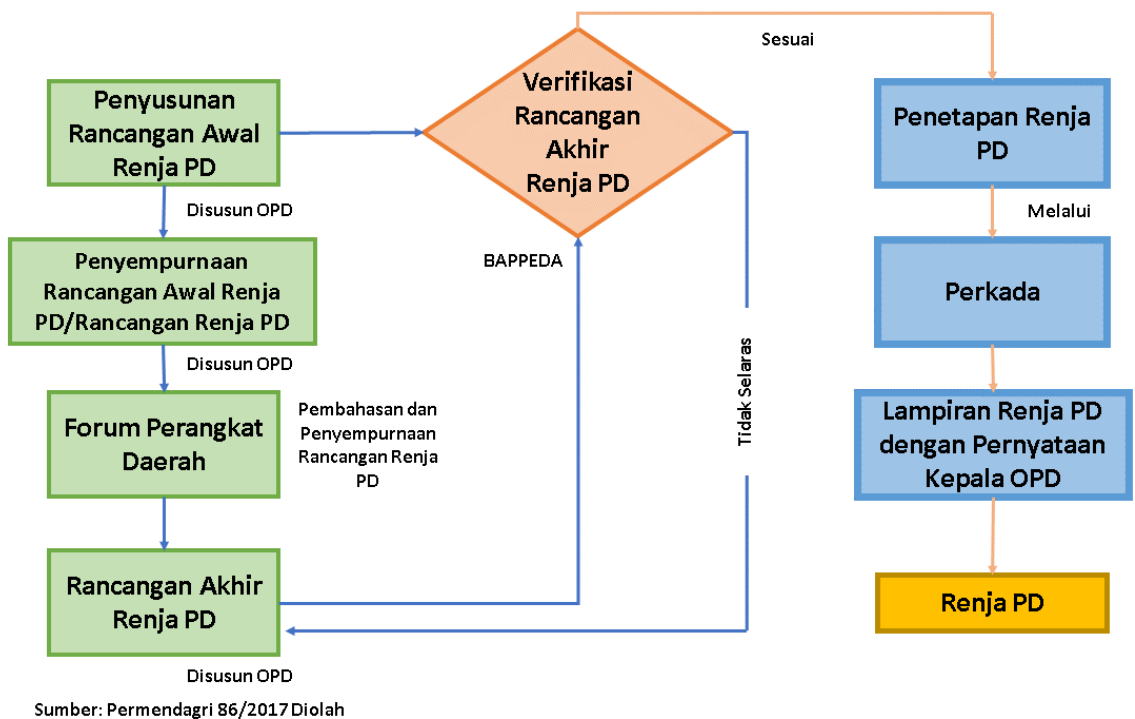
1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berkenaan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

Bagan 1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja RKPD dan harus sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Pemutahiran Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-12/2018) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (16-286/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-93/2022) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024;

36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023;
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
43. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.23/0002965 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
44. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.24/2682 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
3. Sebagai alat untuk menyelaraskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Perangkat Daerah

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sampai triwulan II dan perkiraan capaian tahun 2025 serta kaitannya dengan capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis laporan kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta reuiu terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang rumusan program dan kegiatan perangkat daerah, indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif beserta sumbernya tahun 2024 serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tahun 2025.

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan Kinerja dapat dilihat dari realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus di evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000		6,42	7,90	123,05	6,84	6,84	100
		Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	70						
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	%		40	42,85	107,13	60	60	100
		Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	1						
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	%		30	30	100	40	40	100
		Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan	%	80						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		ekonomi meningkat pemahamannya								
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000		5,70	4,38	130,14	5,64	5,64	100
		Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejar	%		15	20	133,33	20	20	100
		Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	50						
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100						
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%		8,33	75	900	13,889	13,889	100
		Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	58						
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar	%		100	100	100	100	100	100
		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	14	8	8	100	8	10	125
		Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok		10	10	100	20	20	100
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%		35	63,88	182,51	40	63,88	159,70
		Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%		35	63,88	182,51	40	63,88	159,70
		Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	25,71						
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	%		40	100	250	50	63,88	127,78
		Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100						
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	%		42,85	42,85	100	48,57	63,88	131,52
		Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	-	15	20	133,33	20	20	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Kab/Kota	-	5	5	100	7	7	100
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	-	94,28	100	106,07	100	100	100
		Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	-	20	20	100	25	25	100
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	88,57						
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	Kab/kota	-	35	35	100	35	35	100
		Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kab/kota	4						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	10	10	100	15	15	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	11,7	12,46	10,33	120,62	12,36	12,36	100
		Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	-	15	20	133,33	20	20	100
		Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100						
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	%	-	8,33	50	600	13.889	13.889	100
		Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	37,14						
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	-	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	10	10	100
		Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	15	15	100	15	15	100
		Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	-	10	10	100	15	15	100
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%	-	19,44	44,44	228,60	27,7	61,11	220,61
		Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	-	25	25	100	35	35	100
		Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	62						
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	Kab/Kota	-	7	16	228,57	20	22	110
		Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam	Kab/Kota	22						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pembangunan								
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	-	7	15	214,29	10	16	160
		Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1						
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	-	29,50	29,58	100,27	30	30	100
		Unmeetneed KB	%	9,8	12,89	11,63	110,83	12,76	12,76	100
		Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	66,4						
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta KB Aktif	Orang	-	4.282.778	4.346.881	101,50	4.901.017	4.901.017	100
		Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	31,5						
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	%	-	11,70	27,65	236,32	17,5	57,88	330,74
		Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	20						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	-	96,25	97,79	101,60	96,3	96,3	100
		Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	-	90,50	91,53	101,13	91	91	100
		Persentase Keterisian indikator	%	-	25	25	100	30	30	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota								
		Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	36						
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang aktif	Kelompok	-	21.596	21.854	101,19	21.540	21.540	100
		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	18,5						
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	Kelompok	-	7.333	7.333	100	7.000	7.000	100
		Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	-	30	30	100	35	35	100
		Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30						
	Non Urusan									100
	Eks BAU									100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	-	90	90	100	90	90	100
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	-	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90						
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	70						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	35						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	15						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	-	1	1	100	2	2	100
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	60						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	-	1	1	100	1	1	100
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	2	2	100	2	2	100
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	3						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	-	1	1	100	1	1	100
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	-	1	1	100	1	1	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	-	2	2	100	2	2	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Laporan	-	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Daerah								
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	2	2	100	1	1	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja pada urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan			6,42	6,84	7,90	16,41	23,62		
2	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan								60	
3	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender			35	40	63,88	63,88	63,88		
4	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak			35	40	63,88	63,88	63,88		
5	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar								14,29	
6	Persentase Kabupaten/kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama			94,28	100	100	100	100		
7	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)			20	25	20	25	25		
8	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya								82,85	
9	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi			15	20	15	20	20		
10	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak								25	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring			15	20	15	20	20		
12	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan			5,7	5,64	4,38	5,64	5,64		
13	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar								11	
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani								100	
15	Rasio korban kekerasan terhadap anak			12,46	12,36	10,33	12,36	12,36	11,5	
16	Persentase korban kekerasan anak terlayani								100	
17	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring			15	20	20	20	20		
18	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	100	100	100		
19	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	100	100	100		
	URUSAN DALDUK KB									
1	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)			25	35	25	35	35		
2	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			29,5	30	29,58	30	30		
3	Unmetneed KB			12,89	12,76	11,63	12,76	12,76	10	
4	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)								65,58	
5	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang			19,44	27,7	44,44	61,11	61,11		
6	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan								61,11	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota			25	30	25	30	30		
8	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan			96.25	96.3	97,79	96,3	96,3		
9	Persentase UPPKA yang aktif yang melaporkan kegiatan			90.50	91	91,53	91	91		
10	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan								32	
	EKS BAU									
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			90	90	90	90	90	90	
2	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah			90	90	90	90	90		
3	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	75	100	100		
4	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah								45	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dimulai dari keselarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan implementasi kegiatan secara integratif. Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus bersinergis dengan baik. Usulan kebutuhan kegiatan teknis di Kabupaten/Kota telah diakomodir dan menjadi bahan penyusunan program kegiatan di tingkat provinsi. Kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota dengan tetap selaras dengan capaian target indikator kinerja di tingkat provinsi dan indikator kinerja di tingkat Kabupaten/Kota sendiri.

Koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan melalui penyelarasan penyusunan dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan hasil yang optimal antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian kinerja pembangunan nasional. Pengintegrasian 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia antara lain Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pencegahan Perkawinan Anak telah dimasukkan dalam program dan kegiatan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan arahan Presiden terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adanya Program strategis hasil Kerjasama antara Kementerian PP PA dan Kementerian PDT, yaitu lahirnya kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). DRPPA merupakan Desa yang mengintegrasikan **perspektif gender dan hak anak** dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara

terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Sehingga pada saat ini, lokus program dan kegiatan tahun 2023 akan diarahkan pada DRPPA.

Selain itu, adanya Instruksi Presiden terkait Kampung Keluarga Berkualitas mendorong implementasi pembangunan ketahanan keluarga dengan mensinergikan program pembinaan kader Tribina dan KIE KB untuk mendorong kuantitas dan kualitas penduduk.

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, sehingga masih perlu pengembangan kapasitas;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.
4. Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) masih dalam proses renovasi.

Permasalahan dan hambatan tersebut memang tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional, dikarenakan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada dioptimalkan dengan semaksimal mungkin. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Belum maksimalnya kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi;
- b. Masih rendahnya akses sumberdaya ekonomi bagi perempuan.
- c. Rendahnya implementasi kebijakan PUG di perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Semakin kompleksnya kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada masa pandemi;
- e. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- f. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten/Kota;

- g. Belum optimalnya jejaring kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
- h. Belum semua lembaga/instansi/produsen data yang memiliki ketersediaan data pilah gender dan anak.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a. Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan;
- b. Masih rendahnya Kabupaten/kota yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar;
- c. Rendahnya komitmen Kepala Daerah untuk memprioritaskan GDPK 5 pilar sebagai acuan Pembangunan Kependudukan di daerah.
- d. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang belum proporsional;
- e. Meningkatnya jumlah PUS dan angka *Unmetneed*;
- f. Belum optimalnya ketahanan keluarga sebagai upaya untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga;
- g. Belum optimalnya peran aktif kader kelompok Tribina dan UPPKA dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
- h. Belum optimalnya peran serta mitra kerja dalam mendukung program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Kewajiban perangkat daerah Provinsi untuk menyusun analisis gender melalui GAP dan GBS dalam mengimplementasikan PUG pada program dan kegiatan perangkat daerah;
- c. Tersedianya pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- d. Adanya Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;

- e. Koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak (OPD, Rumah Sakit, NGO, dan APH);
- f. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
- g. Adanya Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
- h. Adanya kerjasama atau MOU antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- i. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- j. Adanya Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- k. Adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- l. Adanya dukungan dari unsur pentahelix dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- m. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan di 35 kabupaten/kota;
- n. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
- o. Tersedianya aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak yang dinamis;
- p. Adanya beberapa rancangan draft Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;

- b. Adanya amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk;
- d. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- e. Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan **Kampung Keluarga Berkualitas**;
- f. Telah terbentuk Kampung KB di tiap kabupaten/kota, walaupun belum secara keseluruhan;
- g. Adanya kader KB (PPKBD) sebagai pembantu PLKB di masing-masing desa dan kelurahan;
- h. Kemajuan teknologi sebagai sarana media informasi yang dapat digunakan untuk mendukung program KIE KB.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain:

1. Kesenjangan gender

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki sehingga perlu peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Selain itu juga, pengeluaran perkapita disesuaikan bagi perempuan masih dibawah pengeluaran perkapita laki-laki.

2. Pemenuhan Hak Anak

Perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Menuju Layak anak dari berbagai kategori sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam pembangunan pada tahun 2022 sebanyak 35 kabupaten/kota atau 100% dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah

Beberapa Kabupaten/Kota yang mendapat kategori Kota/Kabupaten Layak Anak terendah dikarenakan belum implementasi kebijakan pemenuhan hak anak seperti sekolah ramah anak, puskesmas layak anak serta pemahaman dan partisipasi

masyarakat terkait pemenuhan hak anak seperti pentingnya desa/kelurahan ramah anak masih rendah sehingga perlu didorong agar pemenuhan hak anak dapat dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan

Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak sampai tahun 2022 sebanyak 1.097 korban yang terdiri korban kekerasan perempuan sebanyak 508 orang dan korban kekerasan anak sebanyak 589 orang. Makin masifnya penggunaan teknologi (Internet, HP, Media Sosial) memberikan dampak meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), sehingga perlu upaya keras untuk pencegahan dan penanganannya.

4. Kesertaan Keluarga Berencana

Prosentase Penggunaan KB MKJP Tahun 2022 sebesar 29,58%. Adapun pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmeetneed) tahun 2022 sebesar 11,63%, mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 14,89%. Masih tingginya unmeetneed karena disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur/PUS untuk ber-KB, sarana prasarana akses layanan KB masih rendah karena masih ada lokasi yang terpencil dan masih banyaknya pemahaman negatif tentang KB.

5. Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Jumlah kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan Tahun 2022 sebanyak 21.854 kelompok, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebanyak 21.856 kelompok. Keaktifan kelompok Tribina yang aktif mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2021 sebesar 89,18%, kemudian naik menjadi 97,79% tahun 2022.

Adapun kelompok UPPKA aktif yang melaporkan kegiatannya tahun 2022 sebanyak 7.333 kelompok, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebanyak 9.662 kelompok. Prosentase kelompok UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan sampai dengan tahun 2022 sebesar 91,53%. Masih rendahnya kapasitas kader

tribina maupun uppka dalam mengadvokasi kelompoknya menjadi penyebab rendahnya kegiatan pada kelompok tribina dan UPPKA.

Kegiatan Strategis yang dapat mendorong pencapaian target program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a) Kegiatan urusan pemberdayaan perempuan akan lebih diarahkan pada lokasi **Kampung Keluarga Berkualitas dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)**, dimana indikator yang ada didalamnya harus dapat diwujudkan melalui beberapa aktivitas yang mendukung pencapaian indikator tersebut.
- b) Mendorong peningkatan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan, untuk mendorong peningkatan wirausaha baru perempuan yang kompeten dan mampu bersaing.
- c) Mendorong sosialisasi dan implementasi UU TKPKS sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d) Meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik melalui sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan.
- e) Mendorong implelementasi PUG di Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai upaya meningkatkan capaian IPG dan IDG di Jawa Tengah.
- f) Mendorong implementasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten/Kota secara optimal.
- g) Mendorong pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak melalui pengasuhan positif.
- h) Optimalisasi layanan Unit Pelaksana Terpadu Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kegiatan Strategis yang dapat mendorong pencapaian target program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a) Kegiatan yang akan dilanjutkan pada tahun 2023 adalah mendorong peningkatan kesertaan KB kepada masyarakat sebagai tindak lanjut rekomendasi DPRD untuk meningkatkan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS).

- b) Penggerakan KB gratis oleh mitra kerja muslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara, TMKK dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dengan target peserta 900 orang atau lebih.
- c) Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak “Jo Kawin Bocah” kepada kader tribina (BKL,BKB dan BKR) dan Pengelola PIK Remaja.
- d) Advokasi Kabupaten/Kota untuk mendorong Kampung Berkualitas di desa atau kelurahan.
- e) Mendorong Kabupaten/Kota untuk Menyusun GDPK 5 Pilar sebagai acuan untuk mendorong kebijakan pembangunan keluarga secara sinergis dan berkelanjutan.
- f) Pengintegrasian program Kampung Keluarga Berkualitas dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				17.107.100.000					17.205.484.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	16.762.100.000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	16.945.484.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	45%	345.000.000		Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	45%	260.000.000	
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jawa Tengah	Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh Kabupaten/Kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak	25%	320.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jawa Tengah	Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh Kabupaten/Kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak	25%	229.800.000	
3	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				1.975.000.000					1.375.000.000	

		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang mereplikasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) atau Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	60%	1.975.000.000	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang mereplikasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) atau Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	60%	1.360.000.000	
4	Perlindungan Perempuan				1.315.000.000					1.052.958.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart	11%	995.000.000	Perlindungan Perempuan	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart	11%	858.350.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	320.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	194.608.000	
5	Peningkatan Kualitas Keluarga				375.000.000					250.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar	14,29%	125.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga	Semarang dan luar Semarang	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar	14,29%	100.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar	14,29%	250.000.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar	14,29%	150.000.000	

6	Pemenuhan Hak anak (PHA)				530.000.000					290.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Presentase Kab/kota yang mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya	82,85%	530.000.000	Pemenuhan Hak anak (PHA)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Presentase Kab/kota yang mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya	82,85%	290.000.000	
7	Perlindungan Khusus Anak				729.900.000					495.358.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak	11,5 per 100.000	389.900.000	Perlindungan Khusus Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak	11,5 per 100.000	300.750.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	340.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	194.608.000	
8	Pengendalian Penduduk				430.000.000					305.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Dokumen GDPK dalam Pembangunan	62%	430.000.000	Pengendalian Penduduk	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Dokumen GDPK dalam Pembangunan	51%	305.000.000	
9	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				1.025.000.000					695.000.000	
		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65,58%	1.025.000.000	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65,58%	695.000.000	
10	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				645.000.000					440.000.000	

		Semarang dan luar Semarang	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32%	645.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Semarang dan luar Semarang	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32%	440.000.000	
--	--	----------------------------	---	-----	-------------	--	----------------------------	---	-----	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PPPA					
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	10%	
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	70%	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	43%	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	10 kelompok	
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100%	
2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	100%	
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	4 Kab/kota	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	20 kelompok	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	31,4%	
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	
				10 kelompok	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 kelompok	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	9%	
URUSAN DALDUK KB					
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
1	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	30,5%	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB.	Provinsi Jawa Tengah	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	10%	
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	18 kab/kota	
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 dokumen	
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
1	Kegiatan Pengelolaan	Provinsi	Jumlah kelompok tribina	45	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jawa Tengah	yang difasilitasi aktif melaporkan kegiatan	kelompok	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Provinsi Jawa Tengah	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	30%	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 dokumen	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90%	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 unit	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 laporan	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 telah diselaraskan dengan Arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN Tahun 2020-2024, Permen No 2-2020 Renstra KPPPA Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala BKKBN No 6 tahun 2020 Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 yang bertujuan :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
7. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia
8. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 yang telah dirubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, antara lain : perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, serta data dan partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan penanganannya secara komprehensif; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan;
2. Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan;
3. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak;
4. Meningkatkan Keluarga Berkualitas;
5. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

Guna mendukung pencapaian tujuan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan secara optimal dan komprehensif;
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak;
4. Meningkatnya perlindungan khusus anak;
5. Terkendalinya jumlah penduduk;
6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam table berikut.

Tabel 3.1.

**Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan		Pengeluaran Perempuan perKapita	Ribu rupiah	10.100
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan Yang dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%	40
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	Per 100.000	5,4
		Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4.25
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	70
		Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	75
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas		Persentase Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2
		Terkendalnya jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%	100
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73,5
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,75
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,90

Tabel 3.2.

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	Perempuan yang sudah dilatih pemberdayaan ekonomi tidak menjadi wirausaha mandiri	12	Kurangnya motivasi dan kesadaran perempuan dalam meningkatkan ekonominya atau berwirausaha mandiri	Angka kemiskinan meningkat serta kontribusi perempuan dalam ekonomi menjadi rendah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender Optimalisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak 	Kepala Dinas	Semester I Tahun 2024
Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Semakin tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan	12	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan OPD lintas Sektor belum berperan optimal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan	Masyarakat khususnya perempuan merasa khawatir dan ketakutan yang berlebihan terhadap kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan peran masing-masing stakeholder dalam pelayanan korban kekerasan Mendorong Kerjasama lintas sector untuk mencegah kekerasan Meningkatkan efek jera bagi pelaku 	Kepala Dinas	Semester II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Menurunnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	12	Makin masif nya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan berbasis gender online, bullying serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendorong pencegahan kekerasan terhadap anak.	Anak menjadi trauma dan menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan terhadap ancaman kekerasan dan bullying	Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif	Kepala Dinas	Semester II Tahun 2024
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Menurunnya Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	12	Komitmen dan implementasi Kabupaten/Kota dalam mendukung kluster konvensi hak anak belum optimal	Terjadinya masalah pada tumbuh kembang anak	Penguatan koordinasi, sinergi dan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan	Kepala Dinas	Semester I Tahun 2024
Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Meningkatnya angka kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS)	12	Belum masifnya sosialisasi manfaat ber KB dan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB	Ledakan penduduk yang memicu permasalahan sosial (kemiskinan, stunting, perkawinan anak dll)	Advokasi dan sosialisasi manfaat kepesertaan KB di masyarakat	Kepala Dinas	Semester II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	Kelompok UPPKA yang sudah didampingi tidak menjadi wirausaha	12	Kurangnya pemodalan dan motivasi kelompok UPPKA dalam memulai usaha	Pemberdayaan ekonomi kelompok UPPKA tidak berdampak signifikan pada tingkat pendapatan keluarga sehingga tidak berpengaruh pada kesejahteraan	Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk kemudahan akses pemodalan usaha (Dinkopumkm, Balai Pelatihan, BUMD)	Kepala Dinas	Semester I Tahun 2024
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Indeks manajemen risiko menurun	6	Pengendalian yang ada belum mampu mengatasi risiko OPD	Target kinerja pada indikator tujuan dan sasaran urusan PP PA dan Dalduk KB tidak tercapai	Dilakukan Pengendalian setiap bulan dan evaluasi RTP setiap semester.	Kepala Dinas	Semester II Tahun 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdiri dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 selama satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan RKPD Tahun 2024.

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator % pmda yang mereplikasi PPEP atau Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebesar 60%.

b. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart sebesar 11%; Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi; Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Program Kualitas Keluarga Berbasis GendeKab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar (jumlah puspaga terstandar KPPPA) sebesar 14,29%.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh kab/kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Prov) sebesar 25%.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kab/kota yang mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya sebesar 82,85%.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak sebesar 11,5 per 100.000; Persentase korban kekerasan anak yang terlayani sebesar 100%.

g. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun dan memanfaatkan GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) dalam pembangunan sebesar 61,11%.

h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase mCPR sebesar 65,58%; Unmetneed KB sebesar 10%.

i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan sebesar 32%.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar 45%; Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90%.

Adapun Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, sebagaimana pada Tabel 4.1. Adapun Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan:

Tabel 4.1

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi PPEP atau Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	%	60	1.375.000.000	65	1.975.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	10	180.465.000	12	435.000.000	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	70	1.194.535.000	75	1.540.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14.29	100.000.000	20	125.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100.000.000	100	125.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh kab/kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Prov)	%	25	229.800.000	30	320.000.000	SEKRETARIAT
		Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	9	229.800.000	12	320.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart	%	11	858.350.000	22	995.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	194.608.000	100	320.000.000	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada perempuan	%	43	125.750.000	52	180.000.000	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	194.608.000	100	320.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	10	732.600.000	12	815.000.000	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/kota yang mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya	%	82,85	290.000.000	82.86	530.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kab/kota	4	240.000.000	4	450.000.000	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	50.000.000	20	80.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar	%	14.29	150.000.000	20	250.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	150.000.000	100	250.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000	11.5	300.750.000	11.8	389.900.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
			Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	194.608.000	100	340.000.000	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	31.4	166.240.000	34.2	160.000.000	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	134.510.000	15	229.900.000	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	194.608.000	100	340.000.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR	%	65.58	595.000.000	65.99	1.025.000.000	
			Unmetneed KB	%	10	100.000.000	12.66	200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kotransepi MKJP	%	30,5	595.000.000	31	875.000.000	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	10	100.000.000	15	150.000.000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	61,11	305.000.000	57	430.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan.	kab/kota	18	300.000.000	20	410.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	5.000.000	1	20.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	440.000.000	34	645.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	19	130.000.000	18,7	190.000.000	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi menjadi wirausaha	%	30	310.000.000	30	455.000.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	16.129.864.000	90	16.945.484.000	SEKRETARIAT
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	45	260.000.000	50	345.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	40	260.000.000	50	345.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	11.913.925.000	1	11.913.925.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	112.000.000	1	122.000.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	301.380.000	90	760.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	851.000.000	100	1.186.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	155.000.000	5	741.773.000	
		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.131.600.000		2.200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		
					target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	556.200.000	4	1.076.000.000	

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penyusunan Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan setiap tahunnya , pentingnya penyusunan Manajemen Risiko adalah untuk memberikan pedoman bagi unsur pimpinan dan staf di Lingkungan OPD dalam menerapkan strategi pengendalian untuk mengantisipasi risiko kegagalan dan/atau mempercepat keberhasilan organisasi, Manajemen Risiko yang telah disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
I.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	Tingkat pemahaman validitas data gender dan anak kurang optimal	12	Belum semua petugas data mempunyai pemahaman yang benar terkait indikator pada aplikasi SIGA Jawa Tengah	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kurang Optimal	- Melaksanakan Rapat Koordinasi - Berkoordinasi dengan OPD terkait	Sekretaris Dinas	Semester I 2024
a.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Tingkat pemahaman validitas data gender dan anak kurang optimal	12	Belum semua petugas data mempunyai pemahaman yang benar terkait indikator pada aplikasi SIGA Jawa Tengah	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kurang Optimal	- Rakor - Bimtek - Surat KaOPD untuk optimalisasi penginputan pada aplikasi SIGA Jateng - Pendampingan atau desk	Sekretaris Dinas	Semester II 2024
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan	belum semua OPD Provinsi mengarusutamakan gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pada program dan kegiatan utama serta	16	Belum adanya komitmen yang kuat oleh setiap OPD, OPD mengalami kesulitan mencari isu gender untuk diintegrasikan pada bidang pembangunan yang	Target Anggaran PPRG minimal sebesar 10% dari total Anggaran daerah tidak tercapai.	- Memberikan pelatihan terkait penyusunan PPRG bagi perencana dan focal point di setiap OPD	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Semester II 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		ekonomi perempuan	berdampak besar pada masyarakat		strategis, Belum adanya RAD PUG	Target presentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi tidak tercapai	- Menyusun Rencana Aksi dan RAD PUG - Memperkuat dan memaksimalkan peran perencana dan focal point pada tiap OPD Provinsi		
a.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	POKJA PUG tidak aktif terlibat	12	Belum adanya komitmen yang kuat oleh setiap OPD, OPD mengalami kesulitan mencari isu gender untuk diintegrasikan pada bidang pembangunan yang strategis, Belum adanya RAD PUG	Target tidak tercapai dengan maksimal	Memperkuat komitmen dan koordinasi	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Semester II 2024
b.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	Di Hari Pelaksanaan Advokasi ada peserta yang tidak hadir sehingga jumlah peserta kurang kriteria Peserta tidak sesuai sehingga perlu diganti di Hari H	2	Seringkali Peserta tidak hadir / meninggalkan kegiatan karena alasan sakit, domestik/rumah tangga, atau bekerja	Target peserta tidak tercapai	-	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	-
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	Belum semua Kabupaten/Kota menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	12	Masih kurangnya kepedulian Kabupaten/Kota terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan	- Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan - Melaksanakan Rakor	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan	Semester II Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
							Perlindungan Perempuan		
a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	Masih adanya peserta Advokasi yang belum memahami dan mengidentifikasi Kekerasan terhadap Perempuan, serta belum mampu mengimplementasikan upaya pencegahannya	8	Konsep, perencanaan dan metode fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan yang kurang matang	Advokasi tidak mencapai Hasil yang diharapkan	-	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan	Semester I Tahun 2024
b.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	Perempuan korban kekerasan belum mendapatkan layanan yang spesifik sesuai kebutuhannya	4	Perempuan korban kekerasan belum percaya sepenuhnya kepada pendamping, ada kejadian yang tidak ingin diketahui oleh pendamping, selain itu tidak semua pelaporan/pengaduan yang masuk ditindaklanjuti, dikarenakan pelapor tidak dapat dihubungi kembali, atau pelapor menolak untuk datang/divisitasi, atau bukan menjadi kewenangan SPT PPA Prov Jateng, misal hak waris dll	Layanan yang diberikan tidak optimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik perempuan korban kekerasan	-	Kepala UPTD	Semester I Tahun 2024
c.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Koordinasi dan kerjasama dalam Pemberian layanan perlindungan perempuan oleh lembaga penyedia layanan di Kab/Kota	9	Belum adanya sinergitas yang baik antar penyedia layanan perlindungan perempuan di Kab/Kota	Perempuan korban kekerasan dan perempuan yang rentan mengalami kekerasan	-	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan	Semester I Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			di Jawa Tengah masih berjalan secara parsial atau belum berjejaring			berulang menjadi tidak terlindungi			
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	Layanan Konsultasi dan konseling keluarga serta Bimbingan masyarakat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) tidak dapat terlaksana sesuai tujuan	8	Kurangnya promosi terkait ketersediaan Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga serta Bimbingan Masyarakat pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Kurang dikenalnya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) oleh masyarakat sebagai penyedia layanan konsultasi dan konseling keluarga serta bimbingan masyarakat	-	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan	Semester I Tahun 2024
a.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	Pemerintah Kabupaten / Kota tidak Kooperatif dalam melaksanakan Advokasi sehingga pelaksanaan terhambat ,TPK2D Kab/Kota Tidak Aktif	4	Pemerintah Kabupaten/Kota kurang memahami pentingnya Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Target tidak tercapai	-	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan	Semester I Tahun 2024
b.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	Tidak banyak masyarakat yang mengakses Layanan Komprehensif bagi keluarga	2	Belum semua masyarakat mengetahui Layanan Komprehensif bagi Keluarga di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi	Target tidak tercapai	-	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Semester I Tahun 2024
V.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai	Menurunnya capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	12	Kurangnya pemahaman dan komitmen para stakeholder di Provinsi	Tidak didapatnya predikat	- Pertemuan dengan Tim Pembinaan dan	Kepala Bidang Pemenuhan	Semester I Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya			dan Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Provinsi Layak Anak	Tim Verifikasi Administrasi KLA, Rapat Koordinasi KLA dan Pendampingan terhadap Kabupaten/Kota terkait evaluasi KLA - Monitoring dan Desk Pendampingan untuk mencermati isian Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang nilai Verifikasi Administrasi maupun nilai final Evaluasi KLA turun serta 10 Kabupat/Kota predikat pratama tahun 2022 serta Pertemuan dengan Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi Administrai KLA	Hak dan Perlindungan Khusus Anak	
a.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Menurunnya capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	12	Kurangnya pemahaman dan komitmen para stakeholder di tingkat Kabupaten/Kota serta	Capaian indikator pengembangan	Pertemuan dengan Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan	Semester I Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				dalam mengimplementasikan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan kurangnya dukungan stakeholder di tingkat Provinsi sebagai Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi Administrasi	KLA tidak tercapai	Administrasi KLA, Rapat Koordinasi KLA dan Pendampingan terhadap Kabupaten/Kota terkait evaluasi KLA Monitoring dan Desk Pendampingan untuk mencermati isian Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang nilai Verifikasi Administrasi maupun nilai final Evaluasi KLA turun serta 10 Kabupat/Kota predikat pratama tahun 2022 serta Pertemuan dengan Tim Pembinaan dan Tim Verifikasi Administrai KLA	Perlindungan Khusus Anak	
b.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan	Kebijakan serta sarana prasarana di berbagai bidang pembangunan tidak ramah anak	12	Partisipasi anak dalam pengambilan kebijakan tidak terakomodasi dengan baik	Kebijakan pembangunan pada bidang terkait anak kurang berpihak	-Keterlibatan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan	Semester I Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	dan dikembangkan dalam KIE				pada kebutuhan anak	- Pendampingan dan fasilitasi kepada Forum Anak dalam menganalisis kebutuhan yang akan menjadi masukan bagi kebijakan pembangunan terkait anak.	Khusus Anak	
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Daerah tidak mengimplementasikan kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dengan optimal	8	kurangnya komitmen pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak tidak berjalan dengan optimal	-	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Semester I Tahun 2024
a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	daerah tidak mengimplementasikan kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dengan optimal	8	kurangnya komitmen pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak tidak berjalan dengan optimal	-	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Semester I Tahun 2024
b.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait AMPK di masyarakat	9	belum meratanya sosialisasi terkait KIE AMPK di Provinsi Jawa Tengah	1. meningkatnya kekerasan terhadap anak 2. tidak terpenuhinya hak-hak AMPK	-	Kepala UPTD	Semester I Tahun 2024
c.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan	kurangnya koordinasi dan sinergitas antara pemangku kebijakan terkait layanan bagi AMPK	6	kurangnya komitmen penyedia layanan bagi AMPK	layanan bagi AMPK tidak berjalan dengan optimal	-	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan	Semester II Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya						Khusus Anak	
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	Target indikator pemerintah daerah yang menyusun dokumen GDPK tidak tercapai	6	Komitmen Kepala Daerah dalam upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui penyusunan GDPK kurang optimal.	Belum terpenuhinya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui penyusunan dokumen GDPK	-	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Semester II Tahun 2024
a.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan penyusunan dokumen GDPK	12	Kurangnya pemahaman mengenai pokok-pokok pembangunan kependudukan	Dokumen GDPK tidak termanfaatkan secara maksimal	- Pelaksanaan Workshop Penyusunan GDPK 5 Pilar - melakukan koordinasi lanjutan dengan cara lain, misal zoom	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Semester II Tahun 2024
b.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tingkat validitas data pada dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kurang optimal	12	Belum semua Kab/Kota dan OPD/stakeholders terkait optimal dalam memberikan datanya	Kualitas dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kurang optimal	- Melaksanakan Rapat Koordinasi - Berkoordinasi dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Semester II Tahun 2024
VIII.	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kampung KB	Kampung KB yang sudah ada kurang	10	Belum optimalnya pelatihan Pemerintah	Kampung KB yang sudah	- Penguatan Pemerintah	Kepala Bidang	Semester II Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	mandiri dan berkelanjutan	mampu berdaya secara mandiri dan hanya sebagai ceremonial saja		Kelurahan/Desa, Kader, maupun ormas dan masyarakat terkait pembentukan Kampung KB	dibentuk belum mampu berdampak positif pada warganya	Desa/Kelurahan, Kader dan Ormas - Pembuatan Regulasi yang jelas terkait pembentukan Kampung KB - Penguatan Komitmen pihak terkait	Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera	
a.	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Kelompok tribina dan PIK R yang aktif tidak dilaporkan	9	Tidak update data ke Penyuluh KB Setempat	Data Kelompok tribina yang aktif tidak valid	-	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera	Semester II Tahun 2024
b.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	Kelompok UPPKA yang aktif tidak dilaporkan	9	Tidak update data ke Penyuluh KB Setempat	Data Kelompok UPPKA yang aktif tidak valid	-	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera	Semester II Tahun 2024
IX.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Belum semua PUS menjadi peserta KB aktif	12	Kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi/penggerakan dari stakeholder kepada masyarakat tentang pentingnya program KB	Kepesertaan KB di daerah menurun	- Pemberian motivasi berupa uang harian bagi akseptor KB MKJP dan kader	Kepala Bidang Keluarga Berencana KIE	Semester II Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
							yang mendampingi - Menambah sasaran pemberian uang harian bagi akseptor KB MKJP dan kader yang mendampingi		
a.	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Belum optimalnya pergerakan advokasi dan KIE program KKBPK melalui mitra kerja	9	- Kurangnya ketrampilan mitra kerja dalam melakukan pendampingan pada masyarakat - Kurangnya partisipasi mitra kerja di lapangan terhadap program KB - Kurangnya dukungan insentif dari pemerintah kepada mitra kerja	-Tingginya angka unmetneed - Meningkatnya angka stunting - Kesertaan berKB rendah	-	Kepala Bidang Keluarga Berencana KIE	Semester II Tahun 2024
b.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	Kurangnya kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan	9	Kurangnya komitmen dalam melaksanakan kegiatan	Program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana dan tidak mencapai tujuan	-	Kepala Bidang Keluarga Berencana KIE	Semester II Tahun 2024
X.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan Perencanaan dan evaluasi OPD tidak sesuai target	8	Perencanaan Target yang Terlalu Tinggi	Capaian Kinerja OPD tidak memuaskan	-	Sekretaris	Semester I Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Adanya Pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan , penyalahgunaan jabatan	8	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Terjadi Gratifikasi dan KKN	OPD telah mencanangkan Zona Integritas dan WBK	Sekretaris	Semester I Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek serta alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Apabila dalam pelaksanaannya, ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPD; 2) mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu “SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif”.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2024 yang perlu diatur antara lain:

1. Sekretariat dan bidang-bidang di Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh pegawai pada Sekretariat dan bidang-bidang di Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai;
3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Untuk menjaga konsistensi dan

keselarasan kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Perubahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan program maupun kegiatan Perubahan Renja secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya optimal terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan peningkatan pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta stakeholder di kabupaten/kota;
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan kabupaten/kota serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung upaya tersebut;
5. Melakukan upaya optimal guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;
6. Mendorong implementasi Grand Desain Pembangunan Keluarga (GDPK) 5 pilar di daerah sebagai upaya mendorong peningkatan pengendalian

kuantitas penduduk dan kualitas penduduk serta pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan anak;

7. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan.